

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Kepulauan Dokdo/Takeshima merupakan satu – satunya pulau yang berada tepat di tengah – tengah antara Korea Selatan dan Jepang dan menyimpan sumber daya alam yang melimpah diantaranya gas hidrat, mineral, minyak, gas, dan ribuan ton ikan. Tidak mengherankan jika pulau Dokdo/Takeshima ini dipersengketakan oleh Korea Selatan dan Jepang. Selain itu menurut kedua negara ini sumber daya alam yang belum di eksplorasi ini dapat mendukung industri teknologi Jepang dan Korea Selatan, jika pulau tersebut dapat digunakan dengan baik maka akan membantu industri teknologi Jepang dan Korea Selatan karena sumber daya alam yang dimiliki kedua negara tersebut saat ini begitu minim dan tidak sesuai dengan kegiatan industri kedua negara tersebut yang sangat produktif. Tetapi perang saling klaim di wilayah tersebut masih terjadi antara Korea Selatan dan Jepang.

Kedua negara tersebut memiliki alasan masing – masing mengapa mereka bisa mengklaim Pulau tersebut. Korea menganggap Pulau tersebut merupakan milik Korea Selatan secara historis dan yuridis. Pada tanggal 18 Januari 1952, Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan garis imajiner bernama Rhee Line yang embatasi wilayah Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang. Garis tersebut memberi konsekuensi bahwa sebagian besar wilayah laut Jepang termasuk Pulau Dokdo berada dibawah kedaulatan Korea Selatan, tidak hanya itu Korea Selatan juga membangun mercusuar dan menempatkan petugas keamanan disana untuk berpatroli disekitar wilayah Pulau Dokdo. Menurut Korea Selatan, kegiatan tersebut dianggap sebagai penguasaan dan pengamanan seara fisik terhadap pulau Dokdo dapat memperkuat klaim Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo tersebut serta memperkuat kedaulatan Korea Selatan terhadap pulau tersebut.

Lalu klaim Jepang adalah Berdasarkan isi Pasal 2 perjanjian San Fransisco tahun 1952, Jepang berpendapat bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak, kepemilikan atas klaim Korea, termasuk pulau Quelpart,

Port Hamilton dan Daleget. Sedangkan kewajiban untuk mengembalikan kepulauan Dokdo kepada Korea tidak disebutkan dalam isi perjanjian San Fransisco tahun 1952 tersebut. Dari perspektif Jepang, 2 batu karang tersebut adalah sebuah pulau, dan karena hal itu Jepang dapat mengklaim 200 mil laut disekitar mereka. Lalu dari perspektif Korea mereka cenderung tidak dapat memperhitungkan ZEE.

Upaya yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima selama ini mengalami hambatan dan masalah seperti penolakan pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional oleh Korea Selatan, hal ini terjadi karena Korea Selatan memiliki klaim yang kuat atas Pulau tersebut dimana Korea Selatan mempercayai secara historis maupun yuridis bahwa kepulauan Dokdo/Takeshima merupakan milik Korea Selatan dan Korea Selatan sendiri sudah mendapat dukungan dunia internasional terkait hal tersebut.

Hal kedua yang diyakini penulis merupakan hambatan dari upaya penyelesaian sengketa tersebut adalah hubungan bilateral yang terjalin antara Korea Selatan dan Jepang karena setiap pertemuan atau kunjungan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang kedua negara tersebut tidak menyinggung atau membahas sedikitpun mengenai sengketa yang terjadi diantara keduanya melainkan kedua negara tersebut berfikir untuk lebih mempererat kerjasama dan hubungan bilateral diantara keduanya.

Hal ketiga adalah campur tangan pihak asing yaitu PBB dan Amerika Serikat dimana PBB mendesak Korea Selatan dan Jepang untuk menyelesaikan masalah ini dengan berdialog tetapi menurut pandangan penulis PBB kurang memainkan perannya sebagai organisasi internasional yang berpengaruh bagi perdamaian dunia. Lalu Amerika Serikat disini memiliki kerjasama trilateral dimana Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan memiliki musuh dan ancaman yang sama yaitu nuklir Korea Utara. Dibalik kerjasama trilateral tersebut Amerika Serikat ingin mendamaikan Korea Selatan dan Jepang dari permasalahan sengketa tersebut, tetapi menurut penulis Amerika Serikat sebagai negara superpower sekaligus mediator belum bisa memainkan perannya ditengah permasalahan sengketa yang terjadi, karena Amerika Serikat terkesan mendiamkan dan

membiarkan permasalahan sengketa Pulau ini dan tidak membuka dialog untuk kedua negara yang bersengketa. Dan di dalam permasalahan sengketa ini Amerika Serikat terlihat dilema karena Korea Selatan dan Jepang merupakan aliansi dari Amerika Serikat.

Hal keempat adalah belum jelasnya batas wilayah kepulauan Dokdo/Takeshima, Korea Selatan dan Jepang melakukan persiapan untuk meratifikasi UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) untuk memperjelas klaim atas pulau Dokdo/Takeshima namun kemudian sengketa kepulauan Dokdo/Takeshima kembali memanas kembali, pada saat Korea Selatan dan Jepang melakukan deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dibawah peraturan UNCLOS di laut Jepang. Sehubungan dengan keadaan laut Jepang yang tidak terlalu luas, maka penetapan batas maritim dirundingkan secara bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. Perundingan tersebut kembali menimbulkan sengketa kepulauan Dokdo/Takeshima. Klaim atas kepulauan Dokdo/Takeshima menjadi penghambat dalam pembuatan perjanjian perbatasan mengenai laut Jepang. Dalam arti “kedua masalah tersebut memberikan contoh terburuk dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang”.

Terlihat sekali bahwa Korea Selatan sangat pasif menanggapi isu sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima ini atau dapat dikatakan Korea Selatan menggunakan “*quiet diplomacy*” dimana didalam berbagai kesempatan pertemuan antara Korea Selatan dan Jepang, Korea Selatan hanya mengutamakan dan mengedepankan kerjasama – kerjasama dengan Jepang tanpa membahas kembali tentang permasalahan sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima ini. Mungkin ini adalah cara Korea Selatan untuk membuktikan kepemilikannya atas Kepulauan Dokdo/Takeshima. Sementara Jepang terlihat sangat serius dan agresif menanggapi isu sengketa ini.

IV.2 Saran

Saran yang bisa penulis ambil disini adalah penulis harap Korea Selatan dan Jepang dapat menyelesaikan permasalahan sengketa Pulau Dokdo/Takeshima ini dengan cara yang mudah untuk ditempuh seperti berdialog tetapi tidak dengan berperang, hal ini dilakukan agar keduanya dapat mengetahui akhir dari sengketa

ini seperti apa, mungkin saja dengan perjanjian pengembangan bersama atau *Joint Development Agreement* di Pulau Dokdo/Takeshima sehingga kedua negara dapat bekerjasama untuk mengembangkan Pulau tersebut dan hasilnya nanti dapat dibagi – bagi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan seperti halnya yang China dan Jepang lakukan terhadap Pulau Senkaku/Diayou.

Dalam sengketa Pulau Dokdo/Takeshima ini terlihat bahwa Korea Selatan tidak terlalu memiliki upaya yang keras untuk menegaskan bahwa Pulau tersebut adalah milik Korea Selatan, Korea Selatan merasa sudah memiliki dukungan internasional tetapi ketegasan dari salah satu negara yang bersengketa dinilai sangat penting untuk memperkuat klaim suatu negara di suatu wilayah yang disengketakan, berbeda dengan Jepang yang sangat tegas mengklaim pulau tersebut adalah milik Jepang.

